

Siaran Pers

KEUANGAN SYARIAH SALAH SATU INSTRUMEN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Tangerang, 29 Oktober 2018 – “Secara nasional, industri keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam dua dekade terakhir. Pada 2017, industri keuangan syariah tumbuh sebesar 27 persen, dan dengan segala dinamika yang terjadi industri keuangan syariah hingga Juni 2018 dapat tumbuh pada kisaran 17 persen secara tahunan (*year-on-year*). Pada posisi tersebut, total aset keuangan syariah Indonesia tercatat Rp1.204 triliun (tidak termasuk saham syariah), atau setara dengan 8,47 persen aset keuangan Indonesia secara keseluruhan. Sementara secara global, dikutip dari data *Islamic Finance Development Report 2017* yang dikeluarkan Thomson Reuters, Indonesia menempati posisi ke-7 dalam *Top 10 Islamic Finance Asset* dengan total aset sebesar USD 81,84 miliar, yang meningkat dari posisi tahun sebelumnya di posisi ke-9,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sekaligus Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dalam sambutannya pada **Seminar Nasional dan International Conference Islamic Economics Finance and Banking (ICIIFEB)** dengan tema *Integrating SDG’s Through Islamic Economics Finance and Banking*, di Auditorium Harun Nasution Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Posisi keuangan syariah Indonesia yang cukup baik di mata dunia tersebut turut didukung sistem keuangan syariah nasional yang lengkap, lanskap ekonomi syariah, serta filantropi syariah yang memadai, sehingga sistem keuangan syariah Indonesia berdaya tahan kuat dan stabil. “Berbagai studi juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi krisis dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Prinsip-prinsip khas dalam sistem keuangan syariah, yaitu prinsip bagi hasil untuk melancarkan investasi yang produktif, membuat sistem keuangan syariah secara inheren stabil. Krisis global tahun 1998 telah membuktikan sistem keuangan syariah Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dan stabil. Saat itu banyak institusi keuangan yang kolaps, namun institusi keuangan syariah kita bisa bertahan dan bahkan terus tumbuh di tengah terpaan krisis,” jelas Menteri Bambang.

Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah agar dapat berperan lebih besar mendorong pemerataan di masyarakat, pemerintah telah merumuskan beberapa langkah strategis. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, agenda pengembangan keuangan syariah diupayakan melalui: (1) percepatan pengembangan sektor keuangan syariah; (2) melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS); (3) meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program pemerintah dan sistem pembayaran; (4) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan (5) mendorong perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

Selain itu, dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), penguatan peran sektor jasa keuangan syariah akan dicapai melalui: (1) peningkatan ekspansi usaha, jaringan, dan produk keuangan syariah; (2) meningkatkan *fair playing field* bagi sektor jasa keuangan syariah; (3) penguatan kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui sinergi kebijakan dengan pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait; (4) mengembangkan kualitas pelaku sektor jasa keuangan syariah; dan (5) melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah. “Arah pengembangan sektor jasa keuangan dalam *master plan* ini bertujuan untuk memperluas akses pemodal dan layanan keuangan, serta mendukung upaya pemerataan dalam pembangunan. Tujuan tersebut hanya dapat ditempuh melalui pengembangan potensi ekonomi daerah, perluasan akses layanan keuangan, dan perlindungan konsumen,” jelas beliau.

Menteri Bambang juga menekankan pentingnya peranan institusi keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah khususnya industri halal di Indonesia. Data terkini mencatat ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen pada 2017, dari tahun sebelumnya yang besarnya USD 29,7 miliar. Apabila perkembangannya terus didorong, industri halal akan membuka peluang dan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di masa yang akan datang. “Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal. Indonesia berada di posisi strategis bagi *halal superhighway link* dalam *global halal supply chain*. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan dan pengusaha industri halal

membutuhkan pendanaan syariah untuk menjalankan bisnisnya, sehingga ke-halal-an produk yang diproduksi memang benar-benar sesuai syariah, baik dari bahan maupun instrumen keuangannya. Hal ini karena status halal suatu produk tidak hanya dilihat dari bahan penyusunnya, namun mencakup keseluruhan proses dalam penciptaan produk halal tersebut. Untuk itu, institusi keuangan syariah dapat berperan dalam menyalurkan dananya kepada para pelaku bisnis dalam industri halal, agar bisnis halal di Indonesia semakin berkembang,” jelas Menteri Bambang.

Tidak hanya industri halal, perkembangan teknologi juga memiliki potensi besar untuk melakukan ekspansi usaha dan memperluas jaringan bagi keuangan syariah. *Financial technology (Fintech)* dapat menjembatani UKM dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan, untuk lebih mudah terintegrasi dengan produk dan sistem keuangan. Selain itu, jumlah investasi aset keuangan juga dapat ditingkatkan melalui *Fintech*. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan *Fintech* di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Laporan terakhir mencatat bahwa produk *Fintech* memiliki potensi menarik 150 juta nasabah dalam sektor perbankan syariah pada 2021. Sebagai negara dengan pasar muslim terbesar di dunia dimana 87 persen dari 250 juta penduduknya adalah muslim, serta populasi pengguna internet terbesar dengan lebih dari 140 juta pada 2017, Indonesia sangat menjanjikan bagi pengembangan pasar *Fintech*.

“Meningkatnya pemahaman masyarakat akan keuangan syariah sebagai model pembiayaan yang bernilai etis, tanggung jawab sosial, dan investasi jangka panjang dapat meningkatkan partisipasi *Fintech* dalam bisnis sosial. Beberapa *Fintech* telah terjun dalam bisnis ini dengan melakukan integrasi dengan lembaga amal zakat, menjalankan wakaf tunai sebagai pembiayaan bagi UKM, memberikan pembiayaan rumah bagi golongan menengah kebawah. Hal ini menjadi signal positif bagi pengembangan *Fintech* syariah yang dapat mendukung pembangunan nasional. Perbankan syariah juga dapat menyalurkan dananya kepada perusahaan *startup* agar dapat mendorong tumbuhnya wirausaha muslim baru, sehingga bank syariah dapat berkontribusi dalam pemberdayaan UKM nasional,” jelas Menteri Bambang. Melalui upaya partisipasi keuangan syariah dalam industri halal dan integrasi dengan *Fintech*, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah sekaligus memberikan dampak yang luas bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 29 Oktober 2018

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id